

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan sektor publik semakin lama semakin pesat. Sektor publik tersebut sebagai entitas yang aktivitasnya menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak. Sedangkan organisasi sektor publik diidentikkan dengan pemerintahan yang mayoritas kepemilikannya adalah berada di tangan pemerintah dengan tujuan untuk memenuhi kesejahteraan di berbagai bidang kehidupan.

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia saat ini adalah semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di lingkungan pusat maupun daerah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menerapkan akuntabilitas publik karena semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang “Keuangan Negara” dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang “Pemerintah Daerah” adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, informasi dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah sesungguhnya bertujuan untuk memenuhi akan kebutuhan informasi keuangan dari kelompok pengguna seperti investor, masyarakat dan juga pemerintah. Laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk dasar dalam mengambil keputusan.

Laporan keuangan pemerintah daerah harus memiliki informasi yang bermanfaat dan harus sesuai dengan kebutuhan para pihak yang berkepentingan. Mengatakan mengenai informasi harus bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan sama saja dengan mengatakan bahwa informasi yang ada di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus mempunyai nilai. Informasi tersebut

akan sangat bermanfaat jika informasi tersebut dipahami, digunakan, serta dipercayai oleh pemakai. Nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan (Armando, 2013). Nilai informasi laporan keuangan tercermin dalam karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebut dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 yang terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan, dan (d) dapat dipahami.

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan kepraktisan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Hal-hal yang menyebabkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan yaitu materialitas, pertimbangan biaya dan manfaat, dan keseimbangan antar karakteristik kualitatif. Berdasarkan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, bahwa kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Masalah pertimbangan profesionalnya yaitu dalam menentukan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif berupa relevansi dan keandalan. Suatu informasi akan kehilangan relevansinya apabila penyampaian laporan keuangan tidak dilakukan tepat waktu. Sedangkan untuk mewujudkan informasi laporan keuangan yang dapat dibandingkan dan dapat dipahami, tidak terdapat kendala sebagaimana menyediakan informasi yang relevan dan andal selama pembuat laporan keuangan menguasai teknik pembuatan dan penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Maka dari itu, keterandalan dan ketepatanwaktuan merupakan dua unsur informasi yang sangat penting dalam hubungannya dengan pengambilan keputusan berbagai pihak. Keterandalan merupakan kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid sedangkan ketepatanwaktuan merupakan tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada

saat dibutuhkan sebelum informasi itu kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Kebermanfaatan sesuatu hal termasuk informasi merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat dinilai pada sisi kualitatif, yang mana menghubungkan antara keputusan, pemakaian dan keyakinan pengguna informasi itu sendiri (Rifandi, 2018). Apakah laporan keuangan pemerintah selama ini sudah memenuhi kriteria kualitas informasi yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan dan apakah laporan keuangan pokok telah disajikan sesuai dengan peraturan?

Pada Provinsi Sumatera Selatan, ada banyak pihak yang mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai. Laporan keuangan yang disajikan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dianggap memiliki informasi yang bernilai apabila laporan keuangan tersebut memenuhi kriteria terutama keterandalan dan ketepatanwaktuan.

Fenomena yang terkait dengan keterandalan dan ketepatanwaktuan dalam penyajian laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu terkait dengan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Hasil Pemeriksaan LKPD Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2010 hingga 2017 mengalami peningkatan lebih baik. Mulai pada tahun 2014, Sumatera Selatan mendapatkan Predikat yang sangat baik dari BPK yaitu berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang artinya bahwa laporan keuangan memberikan informasi yang bebas dari salah saji yang material tanpa adanya pengecualian. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Opini Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Tahun	Opini Badan Pemeriksa Keuangan
2010	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2011	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2012	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2013	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2014	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: www.bpk.go.id

Dari tabel Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan tersebut, dapat kita ketahui bahwa ternyata di dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah mencapai laporan keuangan yang memiliki informasi yang bernilai. Sehingga berarti karakteristik kualitas informasi berupa keterandalan dan ketepatanwaktuan sudah terpenuhi dengan baik. Oleh sebab itu, untuk terus dapat mempertahankan opini WTP, maka sangatlah dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu untuk menjalankan sistem akuntansi sebagai suatu sistem informasi.

Saat ini secara bertahap pemerintah berpindah meninggalkan sistem akuntansi *single entry* menjadi *double entry* karena penggunaan *single entry* tidak dapat memberikan informasi yang komprehensif dan mencerminkan kinerja yang sesungguhnya (Indriasari, 2008). Penerapan basis akuntansi juga mengalami perubahan dari basis kas (*cash basis*) ke basis akrual (*accrual basis*). Kebijakan untuk melakukan aktivitas tersebut tidak akan dapat dilakukan oleh seorang (pegawai) yang tidak memiliki pengetahuan dalam bidang akuntansi tersebut.

Salah satu faktor yang mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Menurut Rifandi (2018) perkembangan teknologi informasi sangat cepat dari masa ke masa, maka dipandang perlu pemerintah daerah memanfaatkan

perkembangan tersebut untuk membantu penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan yang ada. Pemanfaatan teknologi informasi yang dimaksud mencakup (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini.

Kemudian, faktor kedua yang mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu pengawasan keuangan daerah. Pengawasan pemerintah adalah suatu kegiatan untuk menjamin supaya pemerintah daerah berjalan sesuai rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Dewi, Cipta, Bagia (2015) dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*).

Faktor lain yang mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu kompetensi staf sub bagian akuntansi. Laporan keuangan harus dibuat sedemikian rupa sehingga laporan keuangan yang dihasilkan tersebut benar atau valid. Sumber daya manusia yang akan menjalankan sistem tersebut dituntut untuk memiliki kemampuan atau keahlian akuntansi yang memadai yang dapat dicapai dengan adanya kemauan untuk belajar dan mengasah kemampuannya di bidang akuntansi. Disini, kemampuan sumber daya manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang andal. Sumber daya manusia yang berkualitas juga dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik dan sesuai bidangnya sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu.

Beberapa penelitian telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya mengenai nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah ini. Berdasarkan penelitian Indriasari (2008), Roshanti, Sujana, Sinarwati (2014), dan Rifandi (2018) bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap nilai

informasi laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan menurut Jadidah (2016) pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah, sementara menurut penelitian Pramudiarta (2015), Mansur, Prasetyo, mayarni (2017), bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian menurut penelitian Afrianti (2011) bahwa pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan penelitian Fajrin (2014) dan Pramudiarta (2015) bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian menurut Indriasari (2008), Roshanti, Sujana, Sinarwati (2014), Pramudiarta (2015), dan lain-lain bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, bahwa penelitian-penelitian yang dilakukan oleh setiap peneliti tersebut ternyata menunjukkan hasil yang berbeda-beda walaupun menggunakan variabel yang sama, sehingga inilah yang menyebabkan ketertarikan penulis untuk meneliti lebih lanjut menggunakan variabel yang sama yaitu nilai informasi laporan keuangan, kemudian dengan menambahkan variabel-variabel penelitian dan melakukan penelitian di lokasi yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, pokok-pokok permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

1. Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimana pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan?
3. Bagaimana pengaruh kompetensi staf sub bagian akuntansi terhadap nilai informasi laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan?
4. Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah, dan kompetensi staf sub bagian akuntansi terhadap nilai informasi laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, berikut adalah batasan masalah yang akan dijadikan bahan untuk penelitian :

1. Pertanggungjawaban berupa penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan belum sepenuhnya baik karena seringkali laporan keuangan yang disajikan belum sepenuhnya memiliki nilai informasi yang baik.
2. Berkurangnya kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akibat masih ditemukannya data-data yang tidak sesuai dan adanya kasus korupsi di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah, dan kompetensi staf sub bagian akuntansi di Provinsi Sumatera Selatan yang belum sepenuhnya baik.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
2. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi staf sub bagian akuntansi terhadap nilai informasi laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
4. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah, dan kompetensi staf sub bagian akuntansi terhadap nilai informasi laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Instansi
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan khususnya dalam meningkatkan nilai informasi laporan keuangan daerah. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam mempersiapkan laporan keuangan yang lebih bernilai.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian sejenis dan untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan.
3. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman baru tentang kondisi yang sebenarnya yang ada di dunia nyata serta dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dengan dunia nyata.